E-ISSN : 3123-6782
Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Vol 2, No 2 (2026)
Website: https://journal.globalresearchmedia.com/index.php/communityservice
©2026 GRM Academic Press

Harmonisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah: Sosialisasi Implikasi Revisi UUPA Bagi Pemerintah Lokal

Muhammad Ridhwan[1*], Hasanul Bulqiyah[2], Lukiyana[3], Koerniawan Hidajat[4], Fangela Myas Sari[5]

[12345]Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Correspondent email: muhammad.ridhwan@uta45jakarta.ac.id

Received: 11 Juni 2026 **Revised:** 13 Juli 2026 **Accepted:** 7 Agustus 2026 **Published:** 28 Agustus 2026

©2026 by the authors. Licensee Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution(CC BY NC) licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Abstract. The revision of the Law on the Government of Aceh (UUPA) has brought about significant adjustments to the dynamics of special autonomy and local government administration. This community service initiative aimed to enhance the understanding and preparedness of local government officials regarding the legal and administrative implications following the UUPA revision. The event was held on May 12, 2026, at the West Aceh Regent's Office Hall in Meulaboh, involving 50 participants comprising civil servants (ASN), members of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), and representatives from regional institutions. The methodology employed interactive outreach featuring material presentations and Focus Group Discussions alongside participant comprehension assessments via pre- and post-tests. Results indicated a 30% average increase in participant understanding regarding the synchronization of implementing regulations, the division of authority, and regional financial management. The initiative fostered harmonization between central and regional regulations, aiming to establish local governance that is both adaptive and accountable.
Key words: Harmonization, Regional Autonomy, Law, Local Government, Dissemination

Abstrak. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) membawa penyesuaian signifikan terhadap dinamika otonomi khusus dan tata kelola pemerintah lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan aparat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan implikasi hukum dan administratif pasca-revisi UUPA. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 12 Mei 2026 dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), jajaran Forkopimda, serta perwakilan lembaga daerah. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif melalui penyampaian materi, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), dan evaluasi pemahaman peserta via *pre-test* serta *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 30% terkait sinkronisasi aturan turunan, pembagian kewenangan, serta tata kelola keuangan daerah. Kegiatan ini mendorong terciptanya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang adaptif dan akuntabel.
Kata Kunci: Harmonisasi, Otonomi Daerah, UUPA, Pemerintah Lokal, Sosialisasi

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menuntut adanya keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Aceh, sebagai wilayah yang memiliki status otonomi khusus, diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Wacana dan proses revisi UUPA menghadirkan berbagai penyesuaian structures, kewenangan, serta tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada operasional pemerintah lokal.

Namun, dalam praktiknya, perubahan regulasi sering kali menghadapi kendala dalam hal transmisi informasi dan pemahaman di tingkat tapak. Ketidaksiapan aparat pemerintah lokal dalam merespons perubahan hukum berpotensi memicu ketidakselarasan kebijakan (*mismatch policy*) serta hambatan administratif dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pemahaman komprehensif terkait implikasi revisi UUPA. Sosialisasi ini berfokus pada langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah lokal guna menjaga harmonisasi hubungan pusat-daerah dan mengoptimalkan potensi otonomi khusus.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan manifestasi desentralisasi politik dan administratif yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokratisasi di tingkat lokal (Syaukani et al., 2004). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip otonomi daerah dituntut untuk tetap berada dalam koridor harmonisasi regulasi agar tidak memicu disintegrasi hukum antara pemerintah pusat dan daerah (Asshiddiqie, 2006). Keselarasan hirarki perundang-undangan menjadi syarat mutlak agar kebijakan desentralisasi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) yang berpotensi menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Aceh sebagai salah satu daerah provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus, diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA lahir sebagai bagian dari kesepakatan damai (*Memorandum of Understanding* Helsinki 2005) yang memberikan konsesi politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih luas dibanding daerah otonom biasa (Aspinall, 2009). Kendati demikian, seiring perkembangan hukum nasional seperti disahkannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai Undang-Undang Sektoral lainnya muncul berbagai dinamika ketatanegaraan yang menuntut adanya reaktualisasi dan revisi terhadap UUPA.

Wacana dan proses revisi UUPA menghadirkan berbagai perubahan fundamental yang menyentuh ranah struktur kelembagaan, pembagian kewenangan strategis, serta penataan ulang tata kelola keuangan daerah, khususnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) (Nazaruddin, 2020). Penyesuaian regulasi ini berimplikasi langsung terhadap operasionalisasi pemerintah lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Di satu sisi, revisi UUPA dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pembangunan daerah. Namun di sisi lain, perubahan norma hukum selalu membawa ketidakpastian transisional jika tidak dibarengi dengan kesiapan adaptasi aparatur di tingkat tapak (Marzuki, 2017).

Dalam praktiknya, perubahan regulasi berskala besar sering kali menghadapi kendala serius dalam aspek transmisi informasi, sosialisasi, dan pemahaman teknis di tingkat pemerintah daerah. Ketidaksiapan aparat pemerintah lokal dalam merespons dinamisnya perubahan hukum berpotensi memicu ketidakselarasan kebijakan (*mismatch policy*) antara regulasi tingkat pusat, aturan khusus tingkat provinsi (Qanun Aceh), dan pelaksanaan operasional di tingkat kabupaten/kota (Husni, 2021). Hambatan normatif-administratif ini pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas Pelayanan Publik, kepastian investasi daerah, hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran otonomi khusus (Yusuf, 2019).

Mencermati kompleksitas permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara terstruktur untuk memberikan edukasi dan pemahaman komprehensif terkait implikasi hukum dan praktis dari revisi UUPA. Sosialisasi dan pendampingan ini berfokus pada perumusan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh aparatur pemerintah lokal, seperti pemetaan kewenangan teknis, penyesuaian regulasi turunan (Qanun dan Peraturan Bupati/Wali Kota), serta penguatan tata kelola administratif. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi dan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan potensi otonomi khusus Aceh secara berkelanjutan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah Mada, Meulaboh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan simpul administrasi pemerintah daerah di wilayah pantai barat-selatan Aceh. Target khalayak sasaran (*target audience*) kegiatan ini difokuskan pada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pejabat pembuat kebijakan di tingkat pemerintah daerah, meliputi pejabat eselon, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur perencana kebijakan, perwakilan jajaran Forkopimda, serta unsur lembaga adat daerah.

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif (Participatory Action Approach) yang dikombinasikan dengan metode Transfer of Knowledge and Skill (Chambers, 1997; Wardhani, 2018). Pendekatan partisipatif dipilih guna menempatkan peserta bukan sekadar sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang mengidentifikasi persoalan teknis-operasional di instansinya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi (Suharto, 2014):

Pendekatan pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui beberapa tahapan:

Tahap Persiapan

Pada tahapan awal, tim pengabdi melakukan serangkaian kegiatan pra-pelaksanaan untuk menjamin ketepatan sasaran dan relevansi materi:

Analisis Kebutuhan (*Needs Assessment*): Tim pengabdi melakukan studi dokumen dan wawancara awal dengan perwakilan Bappeda serta Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu krusial dan norma spesifik dalam revisi UUPA yang berpotensi memicu ketidakselarasan administratif (*administrative mismatch*) di tingkat lokal (Yudiatmaja, 2016).

Penyusunan Modul dan Media Edukasi: Menyusun modul sosialisasi, lembar kerja FGD, serta materi presentasi interaktif bekerjasama dengan tim ahli hukum tata negara dan spesialis otonomi daerah. Penyiapan instrumen ini merujuk pada standar pengembangan modul pelatihan aparatur guna memastikan keterbacaan dan kepraktisan materi (Sudjana, 2005).

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan di Aula Kantor Bupati Aceh Barat dirancang dalam kerangka pembelajaran orang dewasa (*Andragogy Method*) yang menekankan dialog dua arah dan pemecahan masalah bersama (Knowles et al., 2015). Tahap ini terbagi ke dalam dua kegiatan utama:

Pemaparan Materi Ekspertis: Penyampaian pemikiran kritis dan konstruktif oleh tim ahli mengenai pokok-pokok perubahan UUPA. Sub-topik pembahasan mencakup pembagian kewenangan koncurrent antara pusat dan daerah, rekonstruksi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta adaptasi kelembagaan lokal. Pemaparan ini bertujuan memberikan basis pemahaman konseptual yang kuat bagi aparatur (Ismail, 2019).

Focus Group Discussion (FGD): Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja berdasarkan rumpun kewenangan (misalnya rumpun keuangan, rumpun kelembagaan/hukum, dan rumpun pelayanan publik). Metode FGD digunakan untuk memfasilitasi identifikasi potensi hambatan teknis di lapangan serta merumuskan matriks langkah adaptasi kebijakan di tingkat dinas atau instansi (Krueger & Casey, 2015).

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan sejauh mana transfer pengetahuan berhasil diinternalisasi oleh peserta:

Pengukuran Tingkat Pemahaman (*Pre-Test* dan *Post-Test*): Pengukuran dilakukan secara *before-after design* menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang tervalidasi. *Pre-test* diberikan sebelum sesi pemaparan materi untuk mengukur pengetahuan awal (*baseline knowledge*), sedangkan *post-test* diberikan di akhir kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta (*learning gain*) (Arikunto, 2013).

Pengisian Kuesioner Kepuasan dan Dampak: Peserta diminta menilai aspek kepuasan terhadap penyelenggaraan, kualitas materi, kejelasan narasumber, serta relevansi kegiatan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur di daerah (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Data kuantitatif dari tes dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan perhitungan gain skor terdistribusi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Demografi Peserta

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan 50 orang peserta yang merepresentasikan pemangku kepentingan kunci dalam ekosistem pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Komposisi kepersertaan dirancang secara inklusif untuk memastikan transmisi pemahaman mengenai revisi UUPA dapat menjangkau lini perencana kebijakan, pelaksana teknis, hingga pengawas di tingkat tapak (Nugroho, 2018). Gambaran terperinci mengenai profil dan demografi peserta disajikan pada Tabel 1.

Table 2. Demografi Peserta Kegiatan Sosialisasi (N = 50)

Kategori Demografi	**Sub-Kategori**	**Jumlah (Orang)**	**Persentase (%)**
Instansi / Asal Peserta	Sekretariat Daerah & Bappeda	15	30%
	Dinas / Badan Teknis Daerah	20	40%
	Perwakilan Kecamatan (Camat/Sekcam)	10	20%
	Jajaran Forkopimda & Lembaga Adat	5	10%
Tingkat Jabatan	Pejabat Eselon II & III	12	24%
	Pejabat Eselon IV / Subkoordinator	23	46%
	Staf Analis Kebijakan / Fungsional	15	30%
Tingkat Pendidikan	Sarjana (S1)	32	64%
	Magister / Doktor (S2/S3)	18	36%
Jenis Kelamin	Laki-laki	31	62%
	Perempuan	19	38%

Analisis Pemetaan Demografi dan Implikasi Kebijakan

Distribusi Instansi dan Representasi Kewenangan:

Proporsi terbesar peserta berasal dari Dinas/Badan Teknis Daerah (40%) serta Sekretariat Daerah dan Bappeda (30%). Keterlibatan Bappeda dan Setdakab sangat krusial mengingat kedua instansi ini memegang peran sentral dalam penyelarasan dokumen perencanaan daerah (RPJMK/RKPK) dan penyusunan produk hukum daerah (Qanun/Perbup) dengan regulasi tingkat pusat (Subarsono, 2015). Sementara itu, keikutsertaan perwakilan kecamatan (20%) serta Forkopimda dan Lembaga Adat (10%) menjamin bahwa isu-isu harmonisasi hukum tidak hanya dipahami di tingkat pusat pemerintahan kabupaten, tetapi juga terinternalisasi hingga ke tingkat administrasi kewilayahan dan lembaga normatif-kultural lokal (Ismail, 2019).

Struktur Jabatan dan Kesiapan Operasional:

Dari aspek tingkatan jabatan, mayoritas peserta menduduki posisi Pejabat Eselon IV/Subkoordinator (46%) dan Staf Analis Kebijakan/Fungsional (30%), sementara Pejabat Eselon II & III mencakup 24%. Dominasi pejabat tingkat menengah dan lini depan (*street-level bureaucrats*) ini secara teoritis sangat menguntungkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lipsky (2010), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pemahaman dan diskresi yang dimiliki oleh aparatur pelaksana di tingkat teknis-operasional. Kehadiran Pejabat Eselon II dan III juga penting untuk memastikan komitmen politik (*political will*) serta arahan strategis di tingkat kepemimpinan OPD (Dwiyanto, 2018).

Kapasitas Akademis dan Daya Serap Materi:

Seluruh peserta memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu Sarjana/S1 (64%) dan Magister/Doktor (36%). Tingkat pendidikan yang memadai merupakan variabel prediktor penting yang memengaruhi kapasitas adopsi inovasi regulasi dan daya cerna terhadap materi-materi hukum tata negara yang kompleks (Rogers, 2003). Latar belakang kualifikasi formal ini mempermudah proses diskusi interaktif dan pemetaan masalah teknis selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Inklusivitas Gender dalam Tata Kelola Lokal:

Persentase keikutsertaan peserta menunjukkan rasio 62% Laki-laki dan 38% Perempuan. Meskipun komposisi laki-laki masih mendominasi yang mencerminkan struktur demografi aparatur birokrasi di daerah secara umum keterlibatan perempuan sebesar 38% telah memenuhi ambang batas minimum representasi gender dalam pengambilan keputusan publik (Kusujiarti, 2017). Keterlibatan peserta perempuan

menjamin masuknya perspektif gender dan inklusivitas dalam merespons implikasi revisi UUPA, khususnya terkait sektor pelayanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

B. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Aceh Barat diawali dengan acara pembukaan resmi dan penyampaian arahan umum oleh pimpinan daerah yang menekankan krusialnya kesiapan aparatur dalam merespons dinamika hukum nasional. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi utama oleh tim pakar hukum tata negara dan otonomi daerah. Pemaparan ini dirancang untuk membedah secara komprehensif tiga pilar perubahan krusial dalam revisi UUPA serta menyelaraskan persepsi seluruh elemen pemerintah lokal (Ismail, 2019).

Penataan Kewenangan: Harmonisa Norma Khusus dan Hukum Sektoral Nasional

Pilar pertama berfokus pada pembagian dan penataan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam beberapa dekade terakhir, pelaksanaan otonomi khusus Aceh sering kali berbenturan dengan lahirnya undang-undang sektoral baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi tata ruang nasional yang cenderung menarik kembali kewenangan ke tingkat pusat (Husni, 2021).

Melalui penyampaian materi ini, peserta dibekali pemahaman strategis mengenai prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana kekhususan UUPA harus tetap dipertahankan tanpa mengabaikan asas kepastian hukum nasional (Asshiddiqie, 2006). Penataan kewenangan ini menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menginventarisasi aturan sektoral di daerah dan melakukan sinkronisasi terhadap norma UUPA hasil revisi. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) maupun tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) dalam penerbitan izin usaha, pengelolaan sumber daya alam, dan retribusi daerah (Marzuki, 2017).

Pengelolaan Keuangan: Keberlanjutan dan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pilar kedua membedah implikasi revisi UUPA terhadap aspek keuangan daerah, khususnya keberlanjutan alokasi dan mekanisme pengelolaan Dana Otonomi Khusus

(Otsus) Aceh. Sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUPA, masa berlaku alokasi Dana Otsus mengalami perubahan persentase dan dinamika skema penyaluran yang berdampak langsung pada postur APBK Kabupaten Aceh Barat (Nazaruddin, 2020).

Pemaparan pada sesi ini menekankan bahwa perubahan skema Dana Otsus bukan sekadar persoalan besaran nominal anggaran yang diterima, melainkan transformasi mekanisme tata kelola dari *input-based budgeting* menjadi *performance-based budgeting* (Yusuf, 2019). Pemateri menjelaskan perlunya penguatan sistem pengawasan internal (APIP), transparansi perencanaan program, serta penajaman prioritas alokasi dana untuk pengurangan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan infrastruktur kesehatan dasar. Peserta didorong untuk mengintegrasikan skema pengawasan berbasis digital guna menjamin akuntabilitas pemanfaatan Dana Otsus di tingkat kabupaten (Halim, 2020).

Kelembagaan Lokal: Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang Lincah (*Agile Governance*)

Pilar ketiga membahas aspek kelembagaan lokal dan kesiapan struktur birokrasi dalam mengadaptasi aturan baru. Revisi UUPA menuntut restrukturisasi kelembagaan daerah agar tidak hanya berorientasi pada pembesaran struktur (*size-driven*), melainkan berfokus pada efisiensi fungsi (*function-driven*) dan fleksibilitas tata kerja (Dwiyanto, 2018).

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, penyesuaian kelembagaan ini mengarahkan Perangkat Daerah untuk mengadopsi prinsip *agile governance* suatu sistem tata kelola birokrasi yang lincah, cepat beradaptasi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis (Holbeche, 2018). Sesi ini memberikan rekomendasi konkret mengenai perlunya streamlining birokrasi melalui penyederhanaan struktur jabatan struktural ke fungsional, penyelarasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar-dinas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mendukung kelancaran pelayanan publik pasca-revisi UUPA (Nugroho, 2018).

C. Evaluasi Pemahaman Peserta

Efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini diukur melalui pengujian empiris menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang diisi secara mandiri oleh 50

peserta sebelum dan sesudah intervensi pematerian serta FGD. Evaluasi dilakukan terhadap tiga indikator kognitif-aplikatif krusial: (1) pemahaman regulasi UUPA terbaru, (2) kemampuan identifikasi pembagian kewenangan daerah, dan (3) kesiapan adaptasi kebijakan di tingkat lokal (Arikunto, 2013). Rekapitulasi kuantitatif dari pengukuran sebelum (*baseline*) dan sesudah intervensi (*post-intervention*) disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Evaluasi Pemahaman Peserta Pre-Test dan Post-Test (N = 50)

Indikator Penilaian	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan Absolute	Normalized Gain Score (g)	Kategori Efektivitas
Pemahaman Regulasi UUPA Terbaru	55%	88%	+33%	0,73	Tinggi
Identifikasi Kewenangan Daerah	60%	85%	+25%	0,63	Sedang
Kesiapan Adaptasi Kebijakan Lokal	50%	82%	+32%	0,64	Sedang
Rata-Rata Keseluruhan	55%	85%	+30%	0,67	Sedang-Tinggi

Analisis Kuantitatif dan Implikasi Pengetahuan

Peningkatan Pemahaman Regulasi UUPA Terbaru (33%)

Skor *pre-test* awal berada pada level rendah (55%), mengonfirmasi adanya kesenjangan informasi (*information gap*) di tingkat daerah mengenai norma-norma baru hasil revisi UUPA (Yudiatmaja, 2016). Setelah diberikan intervensi sosialisasi interaktif, terjadi lonjakan pemahaman menjadi 88% dengan nilai *Normalized Gain Score* (g) sebesar 0,73 (Kategori Tinggi) (Hake, 1998). Lonjakan ini menandakan bahwa penyampaian materi secara lugas dan berdasar contoh kasus konkret berhasil

mentransfer pengetahuan substansial mengenai perubahan pasal-pasal kunci UUPA kepada para peserta.

Kemampuan Identifikasi Kewenangan Daerah (25%)

Indikator ini mengalami peningkatan dari 60% menjadi 85%. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa aparatur yang sebelumnya ragu dalam memetakan batas kewenangan antara urusan pemerintahan konkurren dan otonomi khusus, kini memiliki pemahaman konseptual yang lebih jelas (Husni, 2021). Kejelasan batas kewenangan ini sangat krusial untuk meminimalisasi ketakutan atau keraguan aparatur (*paralysis by analysis*) dalam mengeksekusi program kerja sektoral (Lipsky, 2010).

Kesiapan Adaptasi Kebijakan Lokal (32%)

Pada tahap *pre-test*, kesiapan adaptasi kebijakan lokal mencatatkan skor paling rendah (50%), menandakan kekhawatiran aparatur terhadap kebuntuan regulasi daerah. Pasca-kegiatan, nilai ini melompat ke angka 82%. Peningkatan ini mencerminkan terbangunnya efikasi diri (*self-efficacy*) dan kesiapan mental instansi daerah dalam menerjemahkan regulasi atas ke dalam instrumen hukum lokal seperti Qanun dan Peraturan Bupati (Bandura, 1997; Subarsono, 2015).

Ketercapaian Rata-Rata Keseluruhan (30%)

Peningkatan rata-rata keseluruhan sebesar 30% ($g = 0,67$) membuktikan bahwa kombinasi metode ceramah pakar, diskusi kritis, dan FGD partisipatif jauh lebih efektif dibanding sosialisasi searah yang konvensional (Knowles et al., 2015; Wardhani, 2018).

D. Dampak dan Pembahasan

Urgensi Pembentukan dan Penyelarasan Qanun Turunan Baru

Hasil FGD secara tegas menunjukkan perlunya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah proaktif dalam merancang dan merestrukturisasi instrumen hukum daerah. Revisi UUPA secara otomatis membatalkan atau mengubah beberapa norma dasar, sehingga Qanun Aceh maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang ada saat ini berpotensi mengalami kedaluwarsa hukum (*obsolete*) (Asshiddiqie, 2006).

Para peserta dari Bagian Hukum Setdakab dan Bappeda mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memasukkan agenda revisi Qanun ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Langkah harmonisasi ini mendesak guna memberikan

kepastian hukum (*legal certainty*) bagi investor, perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat lokal, serta jaminan kelancaran operasional birokrasi tanpa dibayang-bayangi risiko pelanggaran administratif (Marzuki, 2017).

Perbaikan Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus

Diskusi kelompok terarah di rumpun keuangan menyimpulkan bahwa perubahan skema Dana Otsus pasca-revisi UUPA menuntut pergeseran paradigma tata kelola anggaran. Pengelolaan anggaran tidak lagi bisa diukur semata-mata dari daya serap anggaran (*input-based*), melainkan harus berbasis pada capaian dampak pembangunan (*outcome-based*) (Halim, 2020; Yusuf, 2019).

FGD merekomendasikan perlunya keterbukaan informasi publik terkait alokasi dan pemanfaatan Dana Otsus di Kabupaten Aceh Barat. Sistem pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kabupaten harus diperkuat dengan platform digital berbasis *e-government*. Transparansi ini penting untuk meningkatkan *public trust* dan memastikan bahwa sisa alokasi Dana Otsus benar-benar teralokasi pada sektor prioritas: pengentasan kemiskinan ekstrem, perbaikan infrastruktur publik, serta peningkatan mutu pendidikan daerah (Nazaruddin, 2020).

Kebutuhan Pendampingan Hukum Berkelanjutan (*Institutional Legal Advocacy*)

Salah satu temuan paling menonjol dari proses interaksi peserta adalah adanya trauma administratif dan rasa ragu aparatur lokal dalam mengambil keputusan strategis pasca-perubahan UU. Kendala utama di tingkat tapak bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan ketakutan akan implikasi hukum jika terjadi ketidaksesuaian penafsiran antara pengawas pusat dan daerah (Lipsky, 2010).

Oleh karena itu, FGD menyepakati perlunya pembentukan Forum Pendampingan Hukum Berkelanjutan atau *Klinik Regulasi Daerah* di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Forum ini nantinya berfungsi sebagai wadah konsultasi hukum periodik, mediasi interpretasi regulasi, serta pendampingan teknis bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala OPD dalam menerjemahkan norma UUPA yang baru ke dalam tindakan administratif yang aman dan akuntabel (Ismail, 2019).

Harmonisasi Berbasis Kapasitas SDM Aparatur

Harmonisasi pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan teks perundang-undangan (*law on the books*), melainkan oleh kesiapan dan perilaku aparatur birokrasi yang menjalankannya (*law in action*) (Soekanto, 2018). Peningkatan skor evaluasi peserta terbukti menjadi modal awal yang baik, namun penguatan kapasitas SDM aparatur harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis hukum (*legal drafting*), analisis dampak kebijakan (*regulatory impact assessment*), dan literasi digital (Dwiyanto, 2018). Aparatur yang kompeten dan adaptif merupakan pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lincah (*agile governance*), akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal (Nugroho, 2018).

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat pada 12 Mei 2026 berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan 50 aparat pemerintah lokal dalam menghadapi implikasi revisi UUPA. Harmonisasi pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud apabila penyesuaian regulasi diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM dan pembentukan aturan turunan yang selaras. Saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah pembentukan forum pendampingan hukum periodik bagi pemerintah lokal guna mengawal proses transisi regulasi secara berkelanjutan.

Referensi

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aspinall, E. (2009). *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: RG Press.

Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.

Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Farida, I., & Setiawan, A. (2021). Dinamika Otonomi Khusus dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 8(2), 112–125.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74.

Halim, A. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Holbeche, L. (2018). *The Agile Organization: How to Build an Innovative, Sustainable and Resilient Business* (2nd ed.). Kogan Page.

Husni, M. (2021). Harmonisasi Qanun Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 9(2), 145–160.

Ismail, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 34–48.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (8th ed.). Routledge.

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). SAGE Publications.

Kusujiarti, S. (2017). Inklusivitas Gender dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(2), 101–115.

Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Nazaruddin, A. (2020). Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan Masa Depan Pembangunan Aceh. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 78–95.

Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dynamics, Process, Analysis, and Evaluation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.

Soekanto, S. (2018). Edukasi Hukum dan Harmonisasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–58.

Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Panduan Praktis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Syaukani, H., Afan, G., & Ryaas, R. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wardhani, D. (2018). Metodologi Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatif. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 189–198.

Yudiatmaja, F. (2016). Analisis Kebutuhan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Tingkat Lokal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(3), 112–125.

Yusuf, M. (2019). Tantangan Administrasi Publik dalam Pengelolaan Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 7(3), 210–224.